



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CERIKA RISMAYANTHI**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**
3. NHK : **971779**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 439 m2/160 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah Seluas 2129 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 388.000.000

1. MOBIL, INOVA G-2.0 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 121.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 33.637.260

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 158.207.685

F. HARTA LAINNYA Rp. 10.000.000

Sub Total Rp. 3.411.644.945

III. HUTANG Rp. 320.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.411.324.945



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.